

*SYNERGITAS OF GOVERNMENT DISTRICT KEPULAUAN MERANTI WASTE
MANAGEMENT IN THE YEAR 2015*

Ria Riska Puspitasari

Supervisor: Dr. Khairul Anwar, M.si

*Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau*

*Government Science Faculty of Social Studies Program, University of Riau
Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Tel / Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

This study aims to determine how the synergy District Government Kepulauan Meranti in waste management. This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories.

Based on the results of this study concluded that synergy Kepulauan Meranti regency government in waste management in 2016 had not been effective. Waste management do Office Market, Hygiene and conducting collection and pengakutan rubbish you may have on household waste and rubbish commerce. While the Department of Public Works do the construction of roads and bridges to facilitate the flow of transport of transporting waste, construction of TPS made of concrete / cast to facilitate people throw garbage, construction of drainage as cleanup efforts drains so that the waste does not accumulate in trenches and facilitate attendant waste collector for membersihaknya, besides TPA to establish areas as intended. The Environment Agency only empower the community in waste management through education and training recycle waste, but these activities have not shown significant results in waste management in Kepulauan Meranti District. Obstacles in the waste management collide at the disposal site (TPA) which is narrow, while the new location is very remote and there is no access to the landfill. Infrastructure landfill (garbage cans) and freight transport was minimal. Human resources owned is still very limited does not correspond with the area. Management of waste management is still using the old pattern or the traditional ie the way in fuel. Not been determined by the regulatory / local regulations regarding waste management, so that the direction of waste management often choppy.

Keywords: Synergy, Waste Management, Institutional

SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2015

Ria Riska Puspitasari

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sinergitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan sampah tahun 2016 belum berjalan efektif. Pengelolaan persampahan dilakukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah-sampah yang ada baik itu sampah rumah tangga maupun sampah niaga. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembangunan jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi pengangkutan sampah, pembangunan TPS yang terbuat dari beton/cor untuk mempermudah masyarakat membuang sampah, pembangunan drainase sebagai upaya pembersihan saluran air agar sampah-sampah tidak menumpuk di parit dan mempermudah petugas pengangkut sampah untuk membersihkannya, selain itu menetapkan kawasan TPA sesuai dengan peruntukannya. Badan Lingkungan Hidup hanya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendidikan dan pelatihan mendaur ulang sampah, namun kegiatan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kendala dalam pengelolaan sampah terbentur pada lokasi pembuangan akhir (TPA) yang sempit sedangkan lokasi baru sangat jauh dan tidak ada akses menuju ke TPA. Sarana prasarana penampungan sampah (tong sampah) dan transportasi pengangkutan sangat minim. Sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat terbatas tidak sesuai dengan luas wilayah. Manajemen pengelolaan sampah masih menggunakan pola lama atau tradisional yakni dengan cara di bakar. Belum ditetapkannya regulasi/peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, sehingga arah pengelolaan sampah sering berubah-ubah.

Kata Kunci : Sinergitas, Pengelolaan Sampah, Kelembagaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan pengelolaan sampah dapat terselesaikan dengan mudah jika antar-stakeholders terjalin sebuah sinergitas dengan baik. Sinergitas pada hakikatnya merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama (Pamudji, 1985:12). Terciptanya tata pemerintahan yang baik tidak akan pernah lepas dari adanya sinergitas antara stakeholders untuk mencapai tujuan bersama salah satunya pengelolaan sampah.

Pentingnya sinergitas dalam pengelolaan sampah adalah untuk dapat merencanakan secara integrasi dan agar dapat penindak lanjutkan dari setiap penemuan permasalahan yang ada khususnya dibidang sampah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pasar Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebuah Kabupaten yang terletak di provinsi Riau. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk daerah pesisir yang terletak di Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia Singapore (IMS-GT).

Masalah sampah merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di Indonesia maupun dikota-kota Dunia, karena hampir semua kota daerah menghadapi masalah persampahan. Masalah sampah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun kebiasaan buruk masyarakat dalam membuang sampah terkadang tidak memperdulikan akibat dari pembuangan sampah yang nantinya akan berakibat kemasyarakatan itu sendiri. Adapun data distribusi pengelolaan sampah tahun 2015 di kabupaten kepulauan meranti dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1: Distribusi Pengelolaan Sampah Tahun 2015

NO	KOMPONEN	VOLUME SAMPAH M ³ /HARI
1	Organik	105.73
2	Kertas	14.63
3	Kaca	2.53
4	Plastik	11.38
5	Logam	2.89
6	Kayu	1.42
7	Karet	0.79
8	Lain-lain	5.47
	Jumlah	144.84

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasar 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah sampah yang berasal dari masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah yang berserakan dilingkungan pasarsehingga perlu adanya tugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan sosialisasi atas tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Serta harus adanya peringatan maupun sanksi tegas yang diberikan oleh dinas yang menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan sampah agar tidak terjadinya penumpukan sampah seperti permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti saat ini.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana (tempat sampah, truk sampah, bak sampah dan kontainer sampah) kebersihan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong aksi masyarakat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya.

Tabel 2 : Jumlah Saranadan Prasarana Operasional di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Dump Truck	4 unit	APBD
2	Mobil Pick Up	3 unit	HIBAH
3	Mobil Amrul	1 unit	APBD
4	Mobil L 300	1unit	APBD
5	Becak Motor	8 unit	APBD
	Jumlah	17 Unit	

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasar 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah sarana dan prasarana kebersihan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebanyak 17 unit kendaraan pengangkut sampah yang terdiri dari mobil dump truck 4 unit, mobil pick up 3 unit, mobil amrol 1 unit, mobil L 300 1 unit dan becak motor 8 unit, bak sampah 4 unit yang tersebar di 3 lokasi yaitu di Jl Rumbia, Jl Banglas dan Jl Utama. Angka ini tentu jauh masih kurang jika di dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebanyak 101 desa yang tersebar di 9 kecamatan.

Ketidakseimbangannya sarana dan prasarana operasional kebersihan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan banyaknya jumlah kecamatan yang ada. Sehingga terjadinya penumpukan sampah dilokasi-lokasi per Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Seharusnya di tiap-tiap kecamatan mempunyai kendaraan operasional yang memadai agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif.

Akibat tidak dikelolanya pengelolaan sampah dengan baik di Kabupaten Kepulauan Meranti membuat sampah yang menjadi masalah di masyarakat terus meningkat. Yang dapat dilihat dari data tabel berikut:

Tabel 3 : Perbandingan Jumlah Sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012-2015

No	Jenis sampah	Tahun/Ton				Jumlah Ton
		2012	2013	2014	2015	
1	Sampah rumah tangga	747,8	1073,8	1688,15	2413,35	1480,8
2	Sampah pasar	865,5	1378,75	1931,55	1990,2	1541,5
3	Sampah selokan	1.0705	1.03125	929,5	954,23	471,46

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasar Tahun 2012-2015

Berdasarkan tabel diatas di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 3 jenis sampah berupa sampah rumah tangga, sampah pasar yang terdiri dari sampah plastik dan sayur, dan terdapat sampah selokan yang dimana dapat dilihat bahwa terjadi penumpukan yang sangat

besar baik itu dalam jumlah perhari, perbulan, maupun pertahun.

Yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti walau telah terjadi penumpukan sampah, namun dinas terkait yaitu Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan tidak juga melakukan tindakan atau pencegahan dari kasus tersebut seharusnya sesuai dengan tanggungjawabnya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dapat melakukan pengoptimalisasian sampah dan melakukan kerjasama ke Badan Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan permasalahan sampah agar tidak berdampak kelingkungan sekitar masyarakat.

Besarnya potensi sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti di pengaruhi oleh meningkatnya para pedagang Kaki lima yang berjualan di pasar merupakan faktor utama timbulnya pengotoran lingkungan yang mengakibatkan berbagai kerugian misalnya menyebarnya penyakit menular di masyarakat, rusaknya keindahan dan terjadinya polusi udara sekitar lokasi tumpukan sampah,

Upaya pengelolaan sampah sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 2016 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai salah satu upaya untuk pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008.

Berkembang pesatnya pembangunan suatu daerah mempunyai arah dan tujuan yang memerlukan pemikiran-pemikiran secara menyeluruh tidak cukup hanya dengan melihat hasil pembangunannya sendiri, melainkan juga perlu pemikiran akan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan langsung maupun yang diduga dapat membawa kerugian-kerugian terhadap masalah lingkungan hidup secara ekologis.

Dalam kehidupan masyarakat yang maju, kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat sudah merupakan bagian dari program masyarakat. Masalah kebersihan lingkungan menjadi trending topik karna menyangkut kelangsungan hidup manusia. Kebersihan lingkungan merupakan persoalan

jangka panjang yang penanganannya memerlukan usaha terus-menerus dan tidak dapat ditunda apalagi diabaikan. Setiap kelambatan dalam penanganannya akan menyebabkan usaha penanggulangannya semakin berat.

Dari kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti penulis menemukan gejala atau fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Sejak Kabupaten Kepulauan Meranti dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis belum ada regulasi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan mengenai pengelolaan sampah, sehingga sampai saat ini dalam pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Persampahan.
2. Belum terlaksananya pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah di yang telah direncanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti di Desa Kampung Balak, sehingga Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan masih menjadikan lokasi TPS di Desa Gogok sebagai TPA di sekitar pemukiman masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara (bau tidak sedap).
3. Sosialiasi pengelolaan sampah oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti baru dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup dan belum ada kerjasama antar Dinas yang terkait dalam mengatasi sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kebersihan yang dimiliki Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti seperti armada operasional pengangkutan sampah, bak sampah maupun container sampah.

Berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Sinergitas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan Sampah tahun 2015”**

Rumusan Masalah

Sampai saat ini sampah adalah masalah yang krusial di Indonesia, terlebih dalam hal pengelolaan sampah yang masih tradisonal. Jika di runtut akar permasalahannya, maka sumber utama dari permasalahan sampah ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan cenderung konsumtif serta diperburuk dengan tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan yang rendah, sehingga menyebabkan jumlah sampah yang terus meningkat. Saat ini penanganan masalah sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya dilakukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan tanpa ada bantuan langsung dari Dinas lainnya dan juga masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan, dan Teori yang dipakai yaitu Sinergitas dan Pengelolaan dengan mengkaitkan permasalahan di dalam penelitian penulis mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana Sinergitas pemerintah Daerah dengan dinas-dinas yang terkait (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasar, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum) terhadap pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan optimal di Kabupaten Kepulauan Meranti?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan Sampah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi

bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

Tinjauan Teoritis

1. Sinergitas

Najiyati dan Rahmat mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar (**dalam Rahmawati, 2014: 3**). Sedangkan menurut Wahab sinergi diartikan sebagai interkoneksi dan integrasi antara aktor umum dan swasta, bersama dengan keseimbangan pembagian tugas antara para birokrat dan masyarakat setempat yang telah disepakati sebelumnya (**dalam Wati, 2013: 3**).

Menurut **Lasker, Weiss dan Miller (2001: 183)** sinergi adalah kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif, sumber daya, dan keahlian dari kelompok orang-orang atau organisasi-organisasi. Konsep sinergi merupakan kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif-perspektif, sumber daya, dan keahlian dari sekelompok orang atau organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sinergi merupakan proses kerjasama atau perpaduan elemen untuk dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja sendiri, dan didalamnya ada pembagian tugas berbagai orang maupun organisasi untuk mengkombinasikan unsur-unsur yang dimiliki oleh masing-masing.

Menurut **Rahmawati (2014: 3)** sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, antara lain komunikasi dan koordinasi, sebagai berikut:

1) Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa dalam **Rahmawati (2014: 3)** pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- a) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
- b) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa,

komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

2) Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan dalam **Rahmawati (2014: 3)** bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Silalahi dalam **Rahmawati (2014: 3)** mengungkapkan, “koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah makna kata yang memiliki makna besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi **Andreson (2004:78)**. Menurut **Hasibuan (2008:88)** Pengelolaan merupakan tugas-tugas dasar seorang manajer. Tapi disini lebih menekankan arti dari tugas-tugas tersebut bagi menejer pemasaran. Pengelolaah merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia **Taliziduhu Ndharu, (2003:101)**.

Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur-ulangan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan **Arfan (2005:40)**. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metoda atau keahlian khusus untuk masing masing jenis zat. Pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah yang bertujuan memperkecil atau menghilangkan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah

dianggap baik jika sampah yang diolah mencemari udara, air, tanah, tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan kebakaran.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah volume sampah, dengan melakukan berbagai macam teknik-teknik pengelolaan dan penanganan sampah yang baik dan tepat.

4. Pengertian Sampah

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan (Slamet, 2002:15).

Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat dipahami sampah adalah :

- 1). Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H₂S yang bersifat racun bagi tubuh.
- 2). Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
- 3). Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
- 4). Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit *reversible* atau berpotensi *irreversible* atau sakit berat yang pulih.
- 5). Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah.

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1). Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2). Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert, 1996:97-99).

Definisi Konseptual

- a. Sinergitas adalah, membangun dan memastikan hubungan kerja sama

internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan yang bermanfaat dan berkualitas.

- b. Pemerintah adalah, organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
- c. Pengelolaan Sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya bagi kesehatan lingkungan atau estetika.
- d. Pelayanan pengelolaan sampah merupakan suatu pelayanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah yang perpanjangan tangan diserahkan kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan pasar yang mengacu kepada Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup.
- e. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat pemberlanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Peneliti menguraikan penelitian ini dengan cara deskriptif, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memeparkan keadaan objek yang diselidiki (sesorang, lembaga, masyarakat, perusahaan dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini dinas yang terkait adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, dan berbagai lembaga social yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah hasil wawancara tentang pengelolaan sampah yang dilakukan kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dan wawancara hasil penelitian tentang Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui studi dokumentasi dimana data tersebut sudah berbentuk data matang dan tidak perlu diolah. Data sekunder berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pasar, uraian tugas dan Struktur Organisasi, serta sumber-sumber lain yang terkait penelitian ini.

3. Sumber Data

Untuk mengetahui data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan informan. Pemilihan informan dengan cara *purposive sampling* ini karena penelitian menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukakan ini pada masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya penulis dalam penelitian ini memperoleh datanya harus disesuaikan dengan permasalahan dan situasi serta kondisi sosial yang ada sehingga data yang ada dapat dipertanggungjawabkan kevalidasiannya. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa surat, buku harian, notulensi rapat, dan dokumen-dokumen lainnya.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.
- c. Observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung kelapangan untuk memperoleh informasi tentang Sinergitas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan Sampah.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015

Organisasi dan manajemen pengelolaan sampah merupakan faktor untuk, daya guna dan hasil guna dari pengelolaan sampah. Organisasi dan manajemen juga mempunyai peranan pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi pola organisasi, personalia serta manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) untuk jenjang strategis, taktis maupun operasional. Hubungan kerja antara instansi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah lebih bersifat koordinatif dimana masing-masing instansi mempunyai tanggungjawab

masalah pengelolaan sampah di wilayah masing-masing

1. Aktor yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaku atau aktor pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti oleh satu aktor yaitu pemerintah. Aktor yang lain dalam pengelolaan infrastruktur seperti swasta tidak terlibat dalam pelayanan pengelolaan sampah. Sampai dengan saat ini pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah mendapat berbagai persoalan, mulai dari lokasi TPS yang berdekatan dengan tempat tinggal, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, armada pengangkut sampah yang masih minim, dan sebagainya.

Adapun instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Lingkungan Hidup. Semua instansi terkait memiliki peranan masing-masing dalam keterlibatannya pada pengelolaan sampah di sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Kabupaten Kepulauan Meranti masih mengikuti pendekatan atau paradigma lama dalam pengelolaan sampah yang menganut prinsip bahwa sampah harus secepatnya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang. Semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat diperlakukan sama tanpa upaya untuk meningkatkan efisiensi penanganan yang dilakukan.

Sampah semakin banyak dihasilkan tetapi ketersediaan dana tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. Makin banyak sampah yang tidak mampu ditangani dan pada akhirnya menumpuk di banyak tempat yang tidak seharusnya seperti sungai, lahan kosong, dibakar, dan lain-lain yang menimbulkan masalah serius bagi lingkungan sekitarnya.

2. Kerjasama Instansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara normatif pengelolaan sampah telah diundang-undangkan dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang dimaksud disini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam undang-undang ini juga disebutkan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kebijakan nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah selanjutnya dapat dirumuskan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah dari sumber timbulan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, pada aspek pengelolaan sampah sendiri, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya dibebankan kepada satu SKPD saja akan tetapi semua SKPD yang terkait saling mendukung dan memberi kontribusi nyata dalam pengelolaan sampah. Dalam pengamatan peneliti, pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam mengelola yakni menata tempat sampah, mengangkut sampah, dan mengumpulkan sampah ke tempat pembuangan akhir.

Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum memiliki peranan dalam menyediakan sarana prasarana penunjang mobilitas pengangkutan sampah yakni melakukan perawatan jalan dan meningkatkan kualitas drainase yang selama ini menjadi tempat penumpukan sampah, serta membuat TPS-TPS sementara yang dicor/dibeton agar sampah tidak berserakan kemana-mana. Dalam peranan tersebut terlihat jelas bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sinergitas dengan instansi terkait yakni Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelaslah bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat beberapa instansi yang saling terkait dan saling mendukung agar proses pengelolaan sampah dapat berjalan lancar. Salah satu instansi yang turut mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Dinas Pekerjaan Umum yang senantiasa mempermudah arus transportasi

pengangkutan sampah dengan memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan meningkatkan kualitas drainase saluran air agar sampah tidak menumpuk di satu titik saja, sehingga kebersihan dapat terus terjaga. Dengan demikian, jelaslah bahwa sinergitas antar instansi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan begitu harmonis.

Dalam pengelolaan sampah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan telah merencanakan pengelolaan kebersihan di Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan dan terpadu termasuk sarana dan prasarana.

Permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti memang menjadi tugas Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, akan tetapi tidak seluruh kegiatan mampu ditangani sendiri oleh Dinas tersebut, sehingga membutuhkan kerjasama dan bersinergi dalam mengatasi masalah persampahan.

Adapun program Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2015 dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

Tabel 4 Pengelolaan Persampahan Tahun 2015

No.	Kegiatan
1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
2	Pengelolaan, penataan tempat pembuangan akhir
3	Pengadaan lahan untuk workshop dan gudang
4	Pengadaan tong sampah

Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, 2016.

Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya sampah yang menumpuk di setiap TPS.

Uraian di atas menjelaskan bahwa kurang petugas hingga fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Peningkatan sampah merupakan persoalan yang sangat perlu diperhatikan. Sampah yang semakin tahun semakin meningkat harus segera ditanggulangi oleh Pemerintah. Dengan demikian Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan diharuskan memiliki tenaga kerja yang lebih, mengingat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait

permasalahan petugas dalam menangani sampah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, jika dilihat dari sumber daya manusianya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan masih sangat kurang untuk menangani masalah sampah yang ada di Selatpanjang, akan tetapi bukan hanya sumber daya manusia saja yang menjadi kendala dalam penanganan sampah, serta tidak didukungnya oleh kendaraan pengangkut sampah yang relatif umur kendaraannya yang sudah tua dan tidak layak untuk dipergunakan lagi.

Selain Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum yang turut serta dalam pengelolaan sampah, peranan lembaga lain juga turut memberi andil dan berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang baik dan menjaga lingkungan yakni Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksana daerah di bidang lingkungan hidup yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pentingnya fungsi dan peran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, maka perlu dilakukan penilaian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat. Jika masyarakat bertanggung jawab seperti itu saya kira kondisi persampahan akan baik. Guna mengoptimalkan peran masyarakat dalam upaya penanganan sampah maka perlu adanya lembaga atau organisasi masyarakat yang berfungsi untuk mengkoordinasikan program penanganan sampah dilingkungan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Lingkungan Hidup telah memiliki strategi dalam melaksanakan program pengembangan pengelolaan persampahan. Adapun program kerja yang dilaksanakan BLH Kepulauan Meranti dalam menangani sampah pada tahun 2015 yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1 Program Kerja BLH Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan Sampah pada Tahun 2015

No.	Program Kerja	Pagu Anggaran (Rupiah)	Lokasi
1	Pemberdayaan masyarakat terhadap pengendalian sampah yang memperhatikan aspek lingkungan	400.000.000	Seluruh Kecamatan
2	Pengadaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	500.000.000	Seluruh Kecamatan
3	Pengadaan peralatan pembuatan kompos	430.000.000	Seluruh Kecamatan

Sumber: BLH Kabupaten Kepulauan Meranti, 2016.

Selain program di atas yang dilakukan BLH Kabupaten Kepulauan Meranti secara khusus menangani masalah persampahan. Ada juga program lain yang berhubungan dengan persampahan yakni pengendalian lingkungan hidup menjadi program kerja BLH dengan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengendalikan lingkungan hidup baik itu di darat, laut, dan udara.

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan di atas, ternyata dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan beberapa instansi atau SKPD yakni Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Lingkungan Hidup. Semua instansi yang terkait dalam pengelolaan sampah memiliki peranan yang berbeda-beda, sehingga

pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur.

Sinergitas dari masing-masing instansi terkait dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti memperlihatkan adanya hubungan keterpaduan pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja dengan melibatkan seluruh instansi untuk menyelesaikan suatu permasalahan khususnya dalam pengelolaan sampah.

Adanya sinergitas antar instansi ini memberi dampak yang cukup baik untuk masa mendatang dalam mengelola sampah yang lebih baik dan tepat, agar kebersihan lingkungan dan kepedulian masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah.

3. Keterlibatan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani dengan baik dan benar, serta tidak melibatkan seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani persampahan memang telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pemberdayaan pengelolaan persampahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya sehingga sampah menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat dan tentunya tidak merusak lingkungan.

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan betapa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga masalah sampah sampai saat ini belum mampu diselesaikan dan masih terlihat berserakan di jalan-jalan, sungai-sungai, laut, parit bahkan di TPS sendiri kondisinya sangat memprihatinkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, banyak masyarakat yang belum menyediakan tempat pewadahan sampah, dari dulu yang menjadi sasaran tempat pembuangan sampah adalah tanah kosong dan sampai sekarang masih saja ada masyarakat yang membuang sampah kesungai.

Retribusi persampahan merupakan bentuk konkrit partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan retribusi dibenarkan bila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut:

- Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur
- Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat
- Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yaitu di antaranya:

- Tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata
- Belum melembaganya keinginan dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan
- Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan
- Masih banyak pengelola kebersihan yang belum mencantumkan penyuluhan dalam programnya
- Kehawatiran pengelola bahwa inisiatif masyarakat tidak akan sesuai dengan konsep pengelolaan yang ada.

Selain keterpaduan antar instansi, juga diharapkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi kenyataan untuk masa mendatang. Dimana untuk meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan berbagai upaya seperti menyediakan tempat penampungan sampah sementara agar masyarakat dapat membuang sampah pada

tempatnya dan juga adanya sosialisasi pendidikan dan pelatihan yang diberikan Badan Lingkungan Hidup kepada masyarakat dalam mengelola sampah menjadi produk yang layak jual, sehingga sampah dapat dimanfaatkan menjadi sumber perekonomian baru bagi masyarakat.

4. Pola Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam pengelolaan sampah perlu adanya suatu pola yang terintegrasi dengan baik antar instansi pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Menurut **Rahmawati (2014: 3)** sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, antara lain komunikasi dan koordinasi.

a. Komunikasi

Dalam komunikasi pada program pengelolaan sampah hanya didominasi oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan bersama Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Inefektif komunikasi yang terjadi akan mempengaruhi koordinasi dalam sebuah program yang juga berakibat mempengaruhi sinergitas yang terjadi.

Dengan demikian, jelaslah bahwa sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat luas sangat terbatas dan tidak bersifat mengikat, sehingga hasil pengelolaan persampahan belum berjalan dengan yang diharapkan. Rendahnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan persoalan sampah belum bisa diselesaikan.

b. Koordinasi

Dari pengamatan peneliti, pengolahan sampah dipahami sangat sektoral, yakni hanya dikelola oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan saja dan berorientasi keproyekan pengangkutan sampah, yakni masalah sampah menjadi dasar dan alasan Dinas berwenang untuk memunculkan usulan-usulan proyek seputar pengolahan sampah. Dilain pihak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih minim, misalnya keluhan yang lamban dalam pengumpulan sampah, di TPS dibiarkan berserakan, diangkut dengan truk yang berceceran. Padahal pengolahan sampah tidak murni komersial tetapi juga merupakan bentuk layanan umum.

Sedangkan koordinasi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah masing-masing instansi mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan hanya bertanggung jawab secara teknis langsung dalam pengelolaan sampah dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan ke TPA. Dinas Pekerjaan Umum membangun sarana prasarana untuk mendukung lancarnya pengelolaan sampah, sedangkan Badan Lingkungan Hidup memberdayakan masyarakat tentang pengetahuan pengelolaan sampah agar menjadi sumber ekonomi baru dengan cara mendaur ulang sampah-sampah yang masih layak.

Sampah yang dibuang ke lingkungan akan menimbulkan masalah bagi kehidupan dan kesehatan lingkungan, terutama kehidupan manusia. Masalah tersebut dewasa ini menjadi isu yang hangat dan banyak disoroti karena memerlukan penanganan yang serius.

Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kendala dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepulauan Meranti penulis rangkum sebagai berikut:

1. Tidak adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Hal ini sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan sampah atau penanganan sampah yang ada di seluruh TPS di Kota Selatpanjang sebab berujung kepada permasalahan lain seperti kemacetan, tidak maksimalnya daya angkut, waktu operasional yang lebih lama di jalan, serta biaya operasional yang semakin hari semakin membengkak.

2. Kurangnya fasilitas pengolahan dan pengangkutan sampah

Fasilitas pengolahan sampah (misalnya mesin pemecah sampah organik, tempat sampah yang dibedakan untuk setiap jenis sampah) belum disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga sampah hanya ditumpuk disatu tempat tanpa ada pengolahan yang bisa menguntungkan.

Minimnya jumlah armada pengangkut sampah, yaitu hanya berjumlah dengan kondisi kendaraan yang sudah tua dan sulit untuk dirawat secara khusus karena keseluruhannya harus bekerja hampir nonstop siang dan malam untuk mengangkut sampah dari jalan-jalan, TPS yang ada di seluruh Kota Selatpanjang.

3. Manajemen pengelolaan sampah yang sudah ketinggalan zaman.

Pengelolaan sampah dengan cara membuang seluruh sampah ke TPA, merupakan teknis yang sudah kuno, selain biaya pengadaan lahannya mahal dengan teknik ini masyarakat kurang dilibatkan dan manfaat sampah bagi kehidupan tidak akan terasa, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. akibatnya sampah akan terbuang dengan percuma begitu saja. Padahal sampah merupakan sumber daya yang bisa menghasilkan/menambah sumber energi dan bernilai ekonomis bila diolah dengan baik.

Suatu pendekatan atau paradigma baru harus dipahami dan diikuti, yaitu bahwa sampah dapat dikurangi, digunakan kembali, dan atau didaur ulang, atau yang sering dikenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sudah banyak dilakukan oleh negara maju dan berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan secara signifikan. Dengan mengurangi sampah sejak di sumbernya maka beban pengelolaan kota akan dapat dikurangi dan anggaran serta fasilitas akan dapat semakin efisien dimanfaatkan. Beban pencemaran dapat dikurangi dan lebih jauh lagi dapat turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

4. Regulasi daerah

Belum adanya Perda Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertujuan untuk mengelola sampah dan yang mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakatnya. Hal ini masih mengacu kepada Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pasar dan Pemungutan Biaya Persampahan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sinergitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan sampah tahun 2016 belum berjalan efektif.

1. Pengelolaan persampahan dilakukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah-sampah yang ada baik itu sampah rumah tangga maupun sampah niaga. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembangunan jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi pengangkutan sampah, pembangunan TPS yang terbuat dari beton/cor untuk mempermudah masyarakat membuang sampah, pembangunan drainase sebagai upaya pembersihan saluran air agar sampah-sampah tidak menumpuk di parit dan mempermudah petugas pengangkut sampah untuk membersihkannya, selain itu menetapkan kawasan TPA sesuai dengan peruntukannya. Badan Lingkungan Hidup hanya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendidikan dan pelatihan mendaur ulang sampah, namun kegiatan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat belum tercipta dengan baik, pemerintah berjalan sendiri-sendiri dalam pengelolaan sampah dan hanya BLH yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah jarang sekali terjadi, sehingga persoalan sebenarnya mengenai sampah menjadi sulit ditemui dan dicari jalan keluarnya.
3. Kendala dalam pengelolaan sampah terbentur pada lokasi pembuangan akhir (TPA) yang sempit sedangkan lokasi baru sangat jauh dan tidak ada akses menuju ke TPA. Sarana prasarana penampungan sampah (tong sampah) dan transportasi pengangkutan sangat minim. Sumber daya

manusia yang dimiliki masih sangat terbatas tidak sesuai dengan luas wilayah. Manajemen pengelolaan sampah masih menggunakan pola lama atau tradisional yakni dengan cara di bakar. Belum ditetapkannya regulasi/peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, sehingga arah pengelolaan sampah sering berubah-ubah.

Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan hendaknya mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menambah jumlah personil ataupun pegawai khususnya pada bidang kebersihan, selain itu Dinas hendaknya menginventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan lapangan terutama bidang kebersihan agar pengumpulan, pengangkutan sampah dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Hendak pemerintah bersama masyarakat bekerjasama dan saling bersinergi dalam mengatasi masalah persampahan seperti membuat Bank Sampah, mendaur ulang sampah, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex S, Nitisemito 2008, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Andreson, 2004, *pengelolaan informasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Arfan, *Mengelola Sampah dengan Bijak*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Gulo W. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia
- Hasibuan, 2008, *Pengelolaan Pasar*, Jakarta: Gramedia
- Irwan Soehartono, 2002, *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Lainnya*, Bandung: Remaja Rosa.

Kartikawan, 2007, *Mengelola Lingkungan Hidup Yang Sehat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Meleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. 2011. *SinergitasInstansiPemerintah dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.

Ndraha Taliziduhu, 2003, *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta : Kanisius

Jurnal :

Harianto, 2012. *Pengawasan Camat dalam Pengelolaan Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*". Skripsi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Lia Yulia Iriani, FitriJani Anggraini. 2015. *Peran Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Dikota Pekalongan*. Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Denny Muliando, Aras Mulyadi, *Persepsi Sikap Pedagang dan Masyarakat Mengenai Kondisi Lingkungan Pasar Terhadap Revitalisasi Pasar Dupa Kencana Pekanbaru*. Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.